

JURNAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH RESIK APIK KELURAHAN SRONDOL KULON

Rengganis Elok Briliani, Nina Widowati, Maesaroh

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo Tembalang Semarang Kotak Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Id
23/11/23

ABSTRAKSI

Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik merupakan upaya yang dilakukan masyarakat Brigif Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik untuk memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi barang yang berdaya guna yang dapat menambah pendapatan masyarakat dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik di Kelurahan Srandol Kulon serta faktor penghambat dan pendukungnya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Penelitian ini menggunakan teori dimensi keberhasilan pemberdayaan. Hasil yang diperoleh, aspek akses dan partisipasi sudah terpenuhi dan mendukung terlaksananya pemberdayaan. Dimensi yang tidak mendukung pemberdayaan yang dilakukan, kontrol, dan kesejahteraan. Kontrol berupa pemantauan dan pendampingan tidak dilakukan tim pengawas yang dalam hal ini merupakan pihak kelurahan. Pada dimensi kesejahteraan, masyarakat Brigif Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik masih belum merasakan bertambahnya pendapatan secara signifikan dan belum merasakan kemudahan mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Faktor penghambat pemberdayaan, yaitu keterbatasan kemampuan manajerial dan tidak adanya kemampuan mengelola pasar. Faktor pendorong pemberdayaan, yaitu sumber daya alam. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukannya pendekatan antara pengurus dan masyarakat, dibutuhkan kontrol dari pihak pemerintah, peningkatan intensitas kegiatan Bank Sampah Resik Apik yang lebih intens, inovasi program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, koordinasi internal agar tercipta komunikasi yang jelas, identifikasi peluang dan melakukan riset tentang kompetitor agar konsumen dapat tertarik dengan produk yang dijual.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Bank Sampah, Partisipasi.

COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH RESIK APIK WASTE BANKS IN SRONDOL KULON DISTRICT

Rengganis Elok Briliani, Nina Widowati, Maesaroh

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo Tembalang Semarang Kotak Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Community empowerment through the Resik Apik Waste Bank is an effort made by the people of Brigif, Srandol Kulon Village, Banyumanik District to utilize household waste into useful items that can increase people's income and keep the environment clean and healthy. This research aims to analyze community empowerment through the Resik Apik Waste Bank in Srandol Kulon Village as well as the inhibiting and supporting factors. The data sources in this research were obtained from interviews, observations and documentation. The informant selection technique was carried out using purposive sampling and accidental sampling. The data sources in this research were obtained from interviews, observations and documentation. The informant selection technique was carried out using purposive sampling and accidental sampling. This research uses the dimensions of empowerment success theory. The results obtained, aspects of access and participation have been fulfilled and support the implementation of empowerment. Dimensions that do not support empowerment, control and well-being. Control in the form of monitoring and assistance is not carried out by the supervisory team, which in this case is the sub-district office. In the welfare dimension, the people of Brigif, Srandol Kulon Village, Banyumanik District still have not experienced a significant increase in income and have not experienced easy access to education and health facilities. Factors inhibiting empowerment are limited managerial abilities and the absence of the ability to manage the market. The driving factor for empowerment is natural resources. Suggestions that can be given are the need for an approach between management and the community, control from the government is needed, increasing the intensity of Resik Apik Waste Bank activities more intensely, program innovation that improves community welfare, internal coordination to create clear communication, identifying opportunities and conducting research on competitors so that consumers can be interested in the products being sold.

Keywords : Community Empowerment, Waste Banks, Participation

PENDAHULUAN

Dewasa ini, sampah masih menjadi polemik di berbagai daerah. Semakin tinggi tingkat urbanisasi di suatu daerah akhirnya membawa konsekuensi terhadap jumlah

sampah padat maupun cair akibat dari pertumbuhan penduduk. Sejalan dengan hal tersebut, Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah yang memiliki wilayah

strategis, kini mengalami pertumbuhan yang pesat termasuk terkait permasalahan sampahnya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia sehari-hari melalui proses alam dan berbentuk padat. Upaya mengurangi jumlah timbunan sampah dilakukan dengan penerapan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) atau TPS 3R (Reduce, Recycle, Reuse) yang ada di setiap kecamatan oleh Pemerintahan Kota Semarang (Kustyardhi, et al., 2008). Sistem pengelolaan sampah selaras dengan empat regulasi yang menjadi dasar Pengelolaan Sampah di Semarang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Penanganan sampah yang tidak baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Bagi masyarakat, sampah dapat membahayakan kesehatan mereka dan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diare, cacangan, dan jamur. Bagi lingkungan sekitar, bau busuk dari sampah sendiri dapat merusak lingkungan yang ada. Mengatasi persoalan tersebut, diadakan adanya kegiatan pemberdayaan agar masyarakat mampu mengelola sampah mereka dengan baik dengan melalui program Bank Sampah. Di Semarang, terdapat empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dioperasikan dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Semarang. Setiap UPT terdiri dari 4 kecamatan. Adapun pembagian UPT per kecamatan adalah sebagai berikut : UPT I memiliki cakupan wilayah meliputi kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Selatan, Gajah Mungkur. UPT II memiliki wilayah cakupan meliputi kecamatan Pedurungan, Semarang Timur, Gayamsari, Genuk. UPT III memiliki wilayah cakupan meliputi kecamatan Banyumanik, Gunungpati, Candisari, Tembalang. Sementara UPT IV memiliki wilayah cakupan meliputi Tugu, Ngaliyan Mijen, Semarang Barat.

Tabel 1.2

Jumlah timbulan sampah di masing-masing UPT

UPT	Jumlah Timbulan Sampah
UPT I	232
UPT II	302
UPT III	347
UPT IV	346

Sumber : Waste Upstream Study, KIAT-PwC,2019 (Buku Putih Bappeda Kota Semarang, 2020)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa UPT III merupakan UPT yang memiliki timbulan sampah paling banyak di kota Semarang. UPT III juga merupakan UPT yang cakupan wilayahnya salah satunya adalah Kecamatan Banyumanik. Melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, dihasilkan fakta bahwa jarak kecamatan terjauh dengan TPA Jatibarang adalah Kecamatan Banyumanik dengan jarak sejauh 30 KM. Pengelolaan sampah di Kecamatan Banyumanik ini tentunya menjadi sorotan dan perlu perhatian khusus. Karena dengan menghasilkan jumlah sampah yang tinggi dan jarak yang jauh dengan TPA, tentu akan mempengaruhi jumlah tumpukan sampah yang akan menyebabkan wajah Kota

Semarang yang tidak bersih, tidak rapi dan tidak sehat.

Menariknya, salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Banyumanik yakni Kelurahan Srandol hanya memiliki satu bank sampah yang hingga saat ini masih eksis. Bank Sampah tersebut berada di wilayah Brigif, Srandol Kulon dengan nama Bank Sampah Resik Apik. Bank Sampah Resik Apik adalah upaya pemerintah kota dalam memberdayakan masyarakat guna penanganan sampah di wilayah Srandol Kulon. Bank Sampah Resik Apik telah berdiri dari tahun 2015. Terhitung delapan tahun telah berdiri bukan merupakan waktu yang singkat bagi Bank Sampah. Bank Sampah Resik Apik pun juga telah memiliki Surat Keterangan (SK) mengenai penetapan Bank Sampah Resik Apik di RW III Kelurahan Srandol Kulon Semarang. Meskipun telah memiliki SK, pengelolaan Bank Sampah Resik Apik belum memiliki perkembangan yang baik. Dibuktikan dengan jumlah sampah masuk setiap tahunnya yang stagnan bahkan cenderung menurun.

Tabel 1.3
Jumlah Sampah Masuk tahun
2017-2022

No	Jenis	Jumlah Sampah Masuk				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kardus	360 kg	352 kg	350 kg	350 kg	330 kg
2	Plastik	120 kg	120 kg	115 kg	110 kg	100 kg
3	Margin	180 kg	160 kg	153 kg	147 kg	135 kg
Total		660 kg	632 kg	618 kg	607 kg	565 kg

Sumber : Data Bank Sampah Resik
Apik

Berdasarkan tabel mengenai jumlah sampah masuk Bank Sampah Resik Apik, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan jumlah sampah masuk setiap tahunnya. Tidak hanya satu tahun, namun selama lima tahun terakhir, tidak ada peningkatan jumlah sampah masuk. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya promosi dan koordinasi dengan masyarakat, dalam hal ini pengelola tidak merangkul masyarakat brigif untuk mau berpartisipasi. Kurangnya promosi dan koordinasi dengan masyarakatnya ini menimbulkan kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi. Partisipasi yang rendah akan menimbulkan pemberdayaan yang juga rendah atau tidak berjalan dengan maksimal. Adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menyetorkan sampah ke Bank sampah adalah salah satu

kunci dari keberjalanan Bank Sampah Resik Apik. Adanya program bank sampah di wilayah Brigif sebenarnya dapat dijadikan sebagai peluang untuk menambah pendapatan, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kreativitas. Sebaliknya, peluang tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat brigif.

Setelah delapan tahun berdiri, hingga saat ini Bank Sampah Resik Apik belum berhasil mendapatkan prestasi dari kejuaraan atau perlombaan berbasis lingkungan. Bank Sampah Resik Apik juga mengalami penurunan jumlah pemasukan sampah setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Sampah Resik Apik belum berkembang setelah berdiri bertahun-tahun dan setelah di akui oleh Kelurahan Srandol Kulon sebagai Bank Sampah resmi yang berbasis masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan terkait belum berkembangnya Bank Sampah Resik Apik, menarik peneliti untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang ada pada Bank Sampah Resik Apik Kelurahan Srandol Kulon.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pemberdayaan masyarakat melalui Program Bank Sampah Resik Apik Srandol Kulon?

2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui Program Bank Sampah Resik Apik Sronдол Kulon?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Resik Apik Sronдол Kulon.
2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat pada Bank Sampah Resik Apik Sronдол Kulon

KERANGKA TEORI

1. Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (2008: 8) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan kombinasi antara teori dan praktik yang bertujuan dalam mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah terhadap hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan untuk mendorong kebijakan publik agar responsif terhadap kebutuhan sosial.

2. Manajemen Publik

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) didefinisikan sebagai upaya seseorang dalam bertanggungjawab ketika menjalankan

suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumaryadi (2005:11) adalah upaya untuk mempersiapkan masyarakat bersama dengan memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan

4. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:147-152) menjabarkan bahwa terdapat 4 (empat) dimensi guna mengukur pemberdayaan. Keempat indikator tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Akses, Dimensi ini memiliki arti yaitu masyarakat yang diberdayakan memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukannya untuk mengembangkan diri.
- 2) Partisipasi, Dimensi ini terkait keikutsertaan masyarakat pada kegiatan program pemberdayaan sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam setiap keputusan yang diambil.
- 3) Kontrol, Proses pengamatan atau pengawasan kegiatan secara berkelanjutan agar sesuai rencana.

4) Kesejahteraan, Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar manusia.

5. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Faktor Pendorong pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013:188) adalah Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Kebijakan.

Faktor Penghambat pemberdayaan masyarakat menurut Arsiyah (2009:379) diantaranya adalah Terbatasnya sumber daya manusia, Keterbatasan kemampuan manajerial, .Tidak adanya kemampuan mengelola peluang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif untuk dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini berlokasi di Bank Sampah Resik Apik Kelurahan Spondol Kulon. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Ketua RW 03 Kelurahan Spondol Kulon
2. Ketua Bank Sampah Resik Apik

3. Masyarakat yang terdiri dari dua orang

PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik Kelurahan Spondol Kulon

1.1 Akses

Masyarakat yang diberdayakan pada akhirnya mempunyai akses terhadap sumber daya yang diperlukannya dalam mengembangkan diri. Akses dalam pemberdayaan ini dilihat melalui dua aspek yakni aspek fisik dan aspek non fisik. Berdasarkan hasil analisis peneliti, akses fisik dalam penelitian ini berupa kemudahan masyarakat dalam mendapatkan sumber daya sampah mulai dari kemudahan infrastruktur hingga kemudahan masyarakat dalam bertemu pengurus Bank Sampah Resik Apik sudah sesuai dengan harapan masyarakat.

Akses non fisik dalam pemberdayaan ini berupa minat masyarakat dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat ternyata belum sesuai dengan harapan. Minat masyarakat sebagai akses non fisik dari pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik masih kurang dan masih perlu diberikan himbauan.

1.2 Partisipasi

Partisipasi memiliki arti keikutsertaan masyarakat pada kegiatan program pemberdayaan sehingga masyarakat dapat berperan serta pada setiap keputusan yang diambil. Partisipasi dalam penelitian ini dilihat dari tiga aspek yakni keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan kegiatan, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengumpulkan aspirasi dan usulan dari beberapa perwakilan masyarakat atau dengan pendelegasian. pengambilan keputusan telah melibatkan aspirasi atau usulan dari beberapa unsur masyarakat mulai dari pengurus dasawisma, perwakilan RT, pengurus PKK. Artinya, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan telah difasilitasi oleh Bank Sampah Resik Apik dan sudah melibatkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan Bank Sampah Resik Apik sudah sesuai dengan harapan masyarakat dimana dilakukan dengan adanya rapat berkala yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat. Masyarakat juga sudah ikut serta dalam kegiatan Bank Sampah Resik Apik meskipun tidak di setiap tahapan

pemberdayaan Bank Sampah Masyarakat. Masyarakat yang bukan termasuk pengurus Bank Sampah Resik Apik pada umumnya hanya ikut serta pada tahap pengumpulan atau penyetoran, dan tahap keterampilan.

1.3 Kontrol

Kontrol merupakan proses pemantauan berbagai tindakan yang dilakukan oleh sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bahwa tindakan koreksi dapat diambil untuk memperbaiki kesalahan. Kontrol dalam pemberdayaan ini dilihat dari tiga aspek yakni adanya rapat evaluasi, kontrol masyarakat dalam kegiatan, adanya tim pengawas pemberdayaan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kontrol berupa adanya rapat evaluasi sudah ada namun hanya dilakukan oleh pengurus Bank Sampah Resik Apik. Rapat evaluasi dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan pemberdayaan dilakukan. Sudah terdapat pula kontrol masyarakat dalam kegiatan Bank Sampah Resik Apik. Bentuk dari kontrol tersebut beragam, yakni berupa kontrol dalam bentuk partisipasi aktif, kontrol dalam bentuk Pendidikan lingkungan, dan kontrol dalam bentuk pengawasan. Aspek adanya tim pengawas pemberdayaan belum

sesuai dengan harapan dimana tidak ada tim pengawas yang secara khusus bertugas untuk mengontrol kegiatan Bank Sampah Resik Apik.

1.4 Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar manusia. Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam tercukupinya sandang, pangan, papan, bertambahnya pendapatan masyarakat, tercukupinya kebutuhan pendidikan dan Kesehatan. Kehadiran Bank Sampah Resik Apik membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakatnya dapat terpenuhi melalui hasil tabungan dari Bank Sampah meskipun memiliki nominal yang tidak besar. Aspek bertambahnya pendapatan sudah menunjukkan bahwa masyarakat merasakan bertambahnya pendapatan namun tidak signifikan. Karena harga beli sampah pada Bank Sampah Resik Apik masih rendah. Sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat sebanyak apapun, hanya akan terbeli dengan nominal yang rendah. Untuk itu, tabungan masyarakat yang ada di Bank Sampah Resik Apik sulit untuk mendapatkan penambahan pendapatan dengan jumlah yang

besar kecuali tabungan tersebut tidak diambil dalam waktu yang lama.

Aspek kemudahan mengakses Pendidikan dan Kesehatan belum sesuai dengan harapan masyarakat dimana peneliti menganalisis bahwa dengan adanya Bank Sampah Resik Apik belum dapat membuat masyarakat terbantu untuk mengakses fasilitas Pendidikan dan Kesehatan. Hal ini dikarenakan, pendapatan yang diterima dari Bank Sampah tidak rutin di dapatkan dan apabila didapatkan maka jumlahnya belum cukup untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam mengakses fasilitas Pendidikan dan Kesehatan. Masyarakat Brigif cenderung menggunakan hasil tabungan mereka di Bank Sampah Resik Apik untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan mereka dari pada menggunakannya untuk mengakses fasilitas Pendidikan dan Kesehatan.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik

Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik berdasarkan hasil di lapangan adalah Sumber Daya Alam. Hal ini terlihat dari kekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat Brigif yang berlimpah seperti sampah organik

berupa dedaunan. Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik didukung dengan adanya sumber daya alam yaitu lingkungan yang rindang pepohonan sehingga sampah organik berupa daun banyak ditemui. Adapula masyarakat yang berternak ayam, apabila dimanfaatkan dengan baik maka sampah dedaunan dan kotoran ternak dapat diolah menjadi pupuk dan kain *eco print*.

Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik berdasarkan kenyataan di lapangan adalah keterbatasan kemampuan manajerial dan tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar. Keterbatasan kemampuan manajerial terbukti menjadi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pada Bank Sampah Resik Apik Kesalahpahaman komunikasi, keterbatasan waktu, dan keterbatasan pribadi yang meliputi pengetahuan dan pengalaman menjadi hal yang sering terjadi dalam lingkup internal pengurus yang dapat mempengaruhi efektivitas pemberdayaan yang dilakukan. Pengurus belum dapat menganalisis peluang yang ada untuk menjual kembali produk daur ulang hasil dari keterampilan Bank Sampah Resik Apik dengan menggunakan metode SWOT. Pengurus Bank Sampah Resik Apik juga kesulitan dalam menjual produk secara

online karena persaingan pasarnya lebih terasa.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik Kelurahan Spondol Kulon

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan dimana pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik Kelurahan Spondol Kulon belum berjalan sesuai harapan masyarakat, dibuktikan dengan aspek non fisik, aspek kontrol pengawasan, dan aspek kemudahan mengakses fasilitas pendidikan dan Kesehatan yang pada kenyataannya belum sesuai harapan masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, beberapa dimensi pemberdayaan sudah menunjukkan kesesuaian antara harapan dengan kenyataan di lapangan. hal ini dibuktikan dengan aspek akses fisik, seluruh dimensi partisipasi, aspek adanya rapat evaluasi, aspek kontrol masyarakat dalam kegiatan, tercukupinya sandang, pangan, dan papan serta aspek bertambahnya pendapatan sudah sesuai harapan masyarakat.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik Kelurahan Srandol Kulon adalah faktor Sumber Daya Alam Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik Kelurahan Srandol Kulon adalah faktor keterbatasan kemampuan manajerial dan tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar..

Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang ada di Bank Sampah Resik Apik, adalah diperlukan kontrol dari pemerintah Kota Semarang khususnya kelurahan srandol kulon utk mrningkatkan kontrol pemberdayaan agar masyarakat mendapatkan pengarahan dan pembinaan mengenai Bank Sampah. Diperlukan pula inovasi program dalam Bank Sampah Resik Apik yang dapat meringankan masyarakat dalam mengakses fasilitas Pendidikan maupun Kesehatan.

Saran yang dapat diberikan penulis untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang ada di Bank Sampah Resik

Apik khususnya pada faktor penghambat adalah Diperlukan koordinasi yang baik dalam hal manajerial agar tercipta komunikasi yang jelas. Serta perlu dilakukannya identifikasi peluang yg potensial agar konsumen dapat tertarik dengan produk yang dijual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu Huraerah. (2008). Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora

Abdul, Ruslan Ghofur Noor. (2014). Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustino, L. (2006). *Politik & kebijakan publik*. AIPI Bandung.

Anggoro, M. Toha. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit UT

Aqib Zainal (et.al). (2009). *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Yrama widya

Arsiyah,.et-al. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. Wacana vol.12 No.2 : 370375.

A.W. Widjaja. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada

- Bambang Riyanto. (2001). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. BPFE, Yogyakarta.
- Budiharto, Widodo.(2010). Robotika : Teori + Implementasi. Yogyakarta : Andi
- Deddy. Mulyadi., Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik, Bandung : ALFABETA hlm 129-133
- Fayol Henry. (2012). dialih bahasa M Ladzi Safroni, Manajemen Reformasi Pelayanan Publik
- Hamid, H. (2018). Manajemen pemberdayaan masyarakat.
- Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gavamedia
- Kencana, S. I. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: *Bumi Aksara*.
- Mardikanto. (2013). Konsep Pemberdayaan Masyarakat, Penerbit TS, Surakarta
- Mardikanto dan Soebiato. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung:Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung
- Riyanto,2001. Pembelajaran Perusahaan. BPFE :Yogyakarta
- Slameto. (2003). Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). Desentralisasi dan demokrasi pelayanan publik: Menuju pelayanan pemerintah daerah lebih transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel. Ipdn Press
- Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial. Bandung: *Alfabeta*.
- Sugiyono.(2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta
- Sumaryadi. (2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV Citra Utama
- Suwerda, Bambang. 2012. Bank Sampah. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Solihin, Ismail. (2009). Pengantar Manajemen. Erlangga, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. (2003). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. (2012). Studi tentang Administrasi Publik, Erlangga, Jakarta
- Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat.
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. (2007). Manajemen Pemberdayaan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- JURNAL :
- Arifa, F., Cita, F. P., & Ilman, A. H. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam

Program Bank Sampah Di Kabupaten Sumbawa: Studi Kasus Bank Sampah Desa Nijang. *Nusantara Journal of Economics*, 1(01), 14-27.

Dai, S. I. S., & Pakaya, S. I. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Nilai Ekonomis dan Pembentukan Bank Sampah di Desa Pentadu Timur Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2),

Dewi, R. A. S., Nursan, M., FR, A. F. U., & Irawan, D. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah di Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(3), 173-177.

Febtriasari, Z. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di Bank Sampah Sumber Rezeki: Studi deskriptif di Sukagalih RW 06 Kelurahan Pasirjati Kecamatan Ujungberung Kota Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Hapsari, R. S., Suwasono, E., & Daroini, A. (2020). Bank sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(2), 226-231

Julika, S. R., & Puspaningrum, I. I. (2016). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa. *Public Corner*, 11(2).

Laliasa, G., Nur, M., & Tambunan, R. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis,

Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal of Economic and Business* Vol.1 , 83-103.

Mubarokah, F., Maesaroh, M., & Widowati, N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 156-169.

Oktaviana, K., Warsono, H., & Setianingsih, E. L. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 112-128.

Perkasa, D. H., Fathihani, F., & Apriani, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Sampah Di Kelurahan Tanjung Duren. *Andhara*, 1(2), 19-27.

Putra, W. T. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 69-78.

Putri, K., Pradhanawati, A., & Prabawani, B. (2014). Pengaruh karakteristik kewirausahaan, modal usaha dan peran business development service terhadap pengembangan usaha (studi pada sentra industri kerupuk desa kedungrejo sidoarjo jawa timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 3(4), 313-322.

- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah- masalah Sosial*, 5(1), 71-84.
- Ulpah, M., & Mahfud, I. (2022). Manajemen Bank Sampah Krissan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Madani Syari'ah*, 5(1), 1-10.
- Useva, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Berkah Jaya V Kampung Gaya Baru Iii Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Wartama, I. N. W., & Nandari, N. P. S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah di Desa Sidakarya Denpasar Selatan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 44-48
- Widiasih, E., & Suminar, T. (2015). Monitoring dan Evaluasi Program Pelatihan Batik Brebesan (Studi di Mitra Batik Desa Bentar, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1).